

Teori Konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai Sumber Ketimpangan Sosial

Elsa Adanti¹, Jihan Nur Habibah², Moh. Zacky Ni'ma Hilya³, Zacky Akbar Saputro⁴, Achmad Hufad⁵, Yani Achdiani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: elsaadanti12@upi.edu¹, jihannurhabibah@upi.edu², mzackynh@upi.edu³,

zackyakbars07@upi.edu⁴, achmadhufad@upi.edu⁵, yaniachdiani@upi.edu⁶

Diterima	18	April	2024
Disetujui	19	Juni	2025
Dipublish	19	Juni	2025

Abstract

This study explores the role of power as a source of social inequality using Ralf Dahrendorf's conflict theory as its analytical framework. The research is grounded in the reality of unequal power distribution, which leads to significant disparities in economic, political, social, and cultural spheres. The objective is to analyze the relationship between power structures and social inequality, and to understand how elite domination creates and maintains systemic injustice. A qualitative research approach was employed, with data collected through in-depth interviews with informants who have direct knowledge and experience regarding power and inequality issues. Thematic analysis was used to interpret the data and identify relevant patterns in line with conflict theory. The findings reveal that social inequality is rooted in the power dominance of elite groups who preserve the status quo and marginalize subordinate groups. Contributing factors include weak opposition, unequal access to resources, non-inclusive policy-making, and an unhealthy political culture. The resulting conflict is not merely dysfunctional but acts as a catalyst for social change. The study emphasizes the need for structural reform to promote a more equitable and just society.

Keywords: Power, Social Inequality, Conflict Theory, Domination, Ralf Dahrendorf

Abstrak

Penelitian ini membahas peran kekuasaan sebagai sumber ketimpangan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf. Latar belakang penelitian ini adalah ketimpangan distribusi kekuasaan yang menciptakan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis keterkaitan antara struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial serta memahami bagaimana dominasi kelompok tertentu menciptakan dan mempertahankan ketidakadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terhadap isu kekuasaan dan ketimpangan. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial disebabkan oleh dominasi kekuasaan kelompok elite yang menggunakan otoritas untuk menjaga status quo, memarginalkan kelompok subordinat, serta memperkuat sistem sosial yang timpang. Faktor-faktor seperti lemahnya oposisi, ketimpangan akses terhadap sumber daya, proses kebijakan yang tidak inklusif, dan budaya politik yang tidak sehat memperparah kondisi tersebut. Konflik yang timbul menjadi pendorong bagi perubahan sosial yang lebih adil. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi struktural demi menciptakan tatanan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.



Pendahuluan

Teori Konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial dan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki otoritas dan mereka yang tunduk pada otoritas. Oleh karena itu, konflik terjadi akibat perebutan kekuasaan dan dominasi antar kelompok tersebut. Namun, konflik ini tidak selalu bersifat destruktif, Dahrendorf justru memandangnya sebagai kekuatan pendorong bagi perubahan sosial dan pembaharuan struktur masyarakat (Dahrendorf dalam Siahaan, 2022). Pemikiran ini membuka pemahaman bahwa konflik berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan, khususnya kekuasaan politik, yang menjadi titik sentral dalam pertarungan antar kelompok.

Kekuasaan politik merupakan salah satu elemen utama dalam struktur masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kehidupan sosial. Kekuasaan ini didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengatur, atau mengendalikan tindakan pihak lain dalam suatu sistem politik. Kekuasaan tersebut bisa bersifat formal, seperti yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat politik, maupun informal melalui kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya yang melekat pada kelompok tertentu. Melalui kekuasaan politik yang memang sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara (Andariati, 2020). Suatu kelompok dapat mengatur

kebijakan publik, menentukan hukum, dan mengelola distribusi sumber daya dalam masyarakat, yang pada akhirnya membentuk tatanan sosial yang berpihak pada pihak-pihak yang berkuasa (Siregar, 2022).

Namun, distribusi kekuasaan yang tidak merata ini berkontribusi besar terhadap munculnya ketimpangan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial ditandai oleh perbedaan mencolok dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan antar kelompok, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan. Ketika kekuasaan terkonsentrasi hanya pada kelompok elit tertentu, mereka cenderung menciptakan sistem sosial yang menguntungkan posisi mereka, sementara kelompok lain dibiarkan dalam kondisi yang termarginalkan. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan kecemburuan yang berpotensi memicu konflik horizontal (Putri, 2022).

Dalam kerangka ini, kekuasaan dapat dilihat sebagai sumber utama ketimpangan sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat. Dalam politik, kekuasaan dibutuhkan untuk mendukung dan menjamin berlangsungnya sebuah keputusan politik dalam kehidupan bermasyarakat (Qomariyah, 2024). Ketika kekuasaan digunakan bukan untuk kepentingan bersama, melainkan demi melanggengkan dominasi satu kelompok atas yang lain, maka ketidakadilan sosial pun tak terhindarkan. Kelompok yang berkuasa akan terus memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas dan sumber



daya, sedangkan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi ini menciptakan struktur sosial yang timpang dan memperkuat stratifikasi kelas dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh teori konflik Ralf Dahrendorf (Sulistyo & Irawan, 2022).

Fenomena ketimpangan sosial yang kian mengakar di masyarakat menunjukkan adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata dan cenderung dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketimpangan ini bukan hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam kekuasaan politik yang mempengaruhi akses terhadap hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuasaan berperan sebagai sumber ketimpangan sosial dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial dengan menggunakan pendekatan teori konflik, serta memahami bagaimana dominasi politik dan sosial menciptakan serta mempertahankan struktur sosial yang timpang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, interpretatif, dan kontekstual (Rifa'i, 2023).

Teknik wawancara digunakan untuk

menggali informasi dari informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait dengan fenomena kekuasaan dan ketimpangan sosial dalam pemerintahan. Keseimbangan distribusi kekuasaan adalah cita-cita semua bangsa (Afandi, 2012). Informan yang dipilih merupakan para individu yang melihat atau merasakan langsung adanya ketimpangan sosial ini.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan. Data ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara kekuasaan dan ketimpangan sosial berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti akan mengkategorikan dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang muncul dari wawancara untuk memahami bagaimana kekuasaan berperan sebagai sumber ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Ralf Dahrendorf merupakan salah satu tokoh penting dalam teori konflik modern yang menawarkan pendekatan baru terhadap struktur sosial dan kekuasaan. Berbeda dengan Marx yang menitik beratkan konflik pada kepemilikan alat produksi. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik muncul karena struktur sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, terutama berkaitan dengan distribusi kekuasaan (Saud, Ali, & Demmallino, 2020, hlm. 193). Ia memperkenalkan konsep “imperatively coordinated associations” (asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif), yaitu kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan hubungan kekuasaan dan subordinasi, di mana



konflik menjadi bagian normal dan tak terhindarkan dari kehidupan sosial.. Pendekatannya menggabungkan elemen dari teori fungsionalisme dan konflik, sehingga menghadirkan pemahaman yang lebih dinamis mengenai perubahan sosial dan stabilitas dalam masyarakat modern (Wahid & Tualeka, n.d.,2021)

Ralf Dahrendorf mengembangkan Teori Konflik sebagai respons terhadap keterbatasan teori struktural-fungsional yang terlalu menekankan pada stabilitas sosial dan konsensus. Ia memandang bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi ketegangan antara otoritas dan subordinasi, yang melahirkan konflik sebagai sesuatu yang inheren dan tak terelakkan dalam struktur sosial. Menurut Dahrendorf, konflik tidak semata-mata bersifat negatif, tetapi justru menjadi pendorong utama perubahan sosial. Ia menekankan pentingnya analisis terhadap kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan (authority) dan mereka yang tunduk terhadap kekuasaan tersebut, karena dari sanalah konflik sosial muncul dan memainkan peran dalam dinamika masyarakat (Wahid & Tualeka, n.d.,2021)

Dalam pandangan Ralf Dahrendorf, ketimpangan sosial tidak hanya disebabkan oleh perbedaan ekonomi, melainkan juga oleh struktur kekuasaan yang melekat dalam berbagai institusi sosial. Kekuasaan dianggap sebagai alat yang memungkinkan kelompok dominan untuk mempertahankan kepentingannya melalui pembuatan dan penerapan aturan. Hal ini menciptakan ketegangan antara mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tunduk pada otoritas tersebut, sehingga konflik menjadi tidak terelakkan. Konflik ini bersifat inheren dalam masyarakat modern yang terstruktur secara hierarkis, dan justru menjadi motor penggerak perubahan

sosial ketika kelompok subordinat mulai menuntut redistribusi kekuasaan dan keadilan sosial (Zuldin,2022)

Teori konflik ini menjadi sangat relevan untuk menjelaskan situasi sosial-politik Indonesia saat ini, sebagaimana tergambarkan dalam hasil wawancara dalam penelitian. Struktur kekuasaan yang didominasi oleh elite politik dan ekonomi menciptakan relasi imperatif antara mereka yang memiliki otoritas dan masyarakat yang menjadi subordinat. Ketegangan ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang mengabaikan aspirasi publik. Fenomena tersebut mengilustrasikan bagaimana otoritas digunakan secara sistematis untuk mempertahankan kepentingan kelompok dominan dan menyingkirkan kelompok yang menuntut keadilan atau mengkritik status quo. Dalam konteks ini, teori Dahrendorf menggaris bawahi bahwa konflik yang muncul bukanlah bentuk disfungsi sosial, melainkan ekspresi dari ketimpangan struktural yang melekat dalam institusi negara. Dengan demikian, konflik sosial yang terjadi tidak hanya dapat dipahami sebagai reaksi, tetapi sebagai mekanisme penting untuk mendorong redistribusi kekuasaan dan memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil di masyarakat. Konflik dianggap sebagai kekuatan utama yang menggerakkan perubahan sosial, terutama ketika ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut berkembang menjadi tindakan yang bersifat transformatif (Tualeka, 2017, hlm. 40–42).

Munculnya ketimpangan sosial oleh kekuasaan

Kekuasaan selalu menjadi hal yang sangat diinginkan dan didambakan oleh setiap individu, karena banyaknya akses dan kesempatan dan juga keistimewaan.



Namun selain banyaknya keuntungan yang didapat, kekuasaan ini seringkali menimbulkan berbagai konflik dan masalah sosial, salah satunya yaitu ketimpangan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ketimpangan sosial ini telah muncul sejak dahulu dan terjadi ketika distribusi kekuasaan tidak merata yang membuat struktur kekuasaan dalam masyarakat tidak seimbang karena didominasi oleh suatu kelompok elite yang memegang kendali paling tinggi. Dan karena adanya kelompok yang berkuasa ini, kebijakan pun cenderung dibuat demi kepentingan dan keuntungan mereka semata tanpa melibatkan dan mempertimbangkan aspirasi publik secara luas bahkan kebijakan yang dibuat ini banyak merugikan kelompok yang dikuasai. Kebijakan tersebut juga membuat mereka mengalami marginalisasi, sehingga mereka tersingkirkan secara tidak langsung dengan cara membatasi bahkan menghilangkan hak-hak yang dimiliki mereka. Hal ini dilakukan demi para mempertahankan status quo yang dimiliki para penguasa dan mencegah munculnya kekuatan politik baru yang dapat mengancam kekuasaan mereka. Selain itu, ketimpangan sosial ini juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai. Tidak hanya itu, dampak dari kesenjangan sosial ini juga dirasakan dalam aspek politik dan budaya. Masyarakat yang mengalami marginalisasi seringkali kehilangan suara dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan publik tidak lagi mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial

1. Dominasi kekuasaan oleh kelompok elite

Praktik oligarki yang mengakar kuat dalam sistem Indonesia telah menciptakan dominasi kelompok yang sangat ekstrem, yang tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga merambat ke daerah-daerah kecil. Hal ini menunjukkan bahwa para elite dari berbagai kalangan berusaha mempertahankan hegemoni mereka dengan menguasai sumber daya ekonomi, politik dan birokrasi. Bukti dari adanya praktik ini adalah maraknya politik dinasti dimana kekuasaan diwariskan secara turun-menurun dalam lingkaran keluarga ataupun suatu kelompok tertentu. Yang mana tidak hanya membatasi kelompok lain tetapi juga membentuk struktur kekuasaan yang tertutup dan tidak demokratis. Selain itu, militerisasi yang terus menguat, dan juga simbiosis mutualistik para elite dengan pengusaha untuk kepentingan bisnis mereka.

2. Peran oposisi yang tidak efektif

Kondisi politik Indonesia saat ini menunjukkan bahwa oposisi di Indonesia semakin melemah bahkan mungkin kehilangan fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan dan justru menjadi sebuah perkelahian antar kelompok yang menggerogoti kapasitasnya sendiri sebagai pengawas pemerintah. Hal ini diduga karena maraknya praktik kooptasi dimana partai-partai oposisi berbondong-bondong masuk ke dalam lingkaran kekuasaan untuk mendapatkan akses politik dan sumber daya dan karena mentalitas defensif yang membuat kelompok oposisi sering kali salah menafsirkan kritik masyarakat sebagai serangan politik, bukan sebagai bentuk partisipasi demokratis yang sehat.



3. Perbedaan akses sumber daya

Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya antara kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai sangatlah jauh berbeda menimbulkan kesenjangan yang sangatlah signifikan. Disaat para kelompok elite mendapatkan akses kekuasaan untuk menguasai aset ekonomi, pihak yang dikuasai justru masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tanpa perbaikan sistem yang menjamin pemerataan yang adil, ketimpangan ini akan terus memperburuk kondisi sosial dan menghambat keadilan bagi seluruh masyarakat.

4. Proses pembuatan kebijakan yang tidak inklusif dan tidak transparan

Kebijakan yang seharusnya bersifat netral, partisipatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat kini telah mengalami distorsi menjadi alat politik bagi para kelompok elite. Hal ini semakin mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Seperti adanya patronase politik dimana perekrutan pegawai lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kompetensi dan kapabilitas, praktik korupsi yang semakin canggih dan terus menelan anggaran-anggaran dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat, dan pelayanan publik yang diskriminatif dimana rakyat biasa perlu melakukan prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang lama. Sementara itu, para elite mendapatkan akses khusus dan perlakuan istimewa. Hal ini membuat Masyarakat semakin apatis terhadap proses politik karena melihat kebijakan tidak lagi berpihak pada mereka, kualitas pelayanan publik terus menurun karena diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan pembangunan pun terhambat karena dana-dana yang hilang.

5. Budaya politik yang tidak sehat

Faktor budaya juga turut memperkuat adanya ketimpangan sosial ini. Seperti sistem feodal yang masih tertanam menimbulkan mentalitas paternalistik dimana ketimpangan kekuasaan dinormalisasi. Banyaknya politik identitas yang dicetuskan oleh para elite untuk menutupi atau mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah-masalah struktural dengan mengedepankan isu-isu primordial, selain itu penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi yang dianggap wajar dan sudah biasa terjadi.

Ketiga faktor ini - feodalisme, politik identitas, dan normalisasi korupsi - saling menguatkan, menciptakan ketimpangan yang sulit diputus tanpa perubahan mindset mendasar.

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dan dikaji dengan hasil memberikan analisis peran kekuasaan dalam menciptakan ketidaksetaraan sosial berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf. Menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat dalam masyarakat terjadi karena distribusi kekuatan yang tidak merata, dengan demikian memusatkan kekuatan dalam kelompok elit. Kelompok dominan ini menciptakan pedoman yang cenderung mengarah pada mereka sementara sub kelompok terpinggirkan.

Ketimpangan sosial ini memperlebar kesenjangan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, yang mengarah pada ketidakstabilan sosial dan berpotensi menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, penting untuk terus



memahami bagaimana distribusi keadilan dapat dicapai. Dengan penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi struktural yang akan mendorong politik yang lebih terintegrasi dan adil sehingga keadilan sosial dapat dirasakan dari semua tingkat masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afandi, A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Faucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131-149.
- Andariati, L. (2020). Filsafat Politik Plato. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 10(1), 88–115. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-9.
- Irawan, A. D., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>
- Makmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Tantangan Hukum Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 1-17.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Qomariyah, N. (2024). Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli). *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(3), 352-360.
- Ristian, A. (2016). Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 189. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.441>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31-37.
- Saud, M.Y., Ali M.S.S., & Demmanilo E.B. (2020). Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal



dalam Perspektif Perencanaan.
Azizah Publishing.

Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409>

Tumengkol, S. M. (2012). Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri.

Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.

